

Nama : Selvidar Armalia

NPM : 2313031014

Kelas : A 2023

Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Provinsi Nusantara Raya

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Secara umum, alokasi anggaran pendidikan sebesar 22% dari APBD sudah cukup baik karena melebihi standar minimal nasional. Namun, dari sisi efisiensi, penggunaan anggaran tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya skor literasi dan numerasi siswa serta tingginya ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan desa. Artinya, anggaran yang besar belum mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang maksimal.

Permasalahan utama terletak pada besarnya belanja gaji dan tunjangan guru yang mencapai 68%. Meskipun kesejahteraan guru penting, distribusi guru yang tidak merata menyebabkan banyak sekolah di kota mengalami kelebihan guru, sedangkan daerah terpencil justru kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, anggaran untuk digitalisasi dan bantuan siswa masih terlalu kecil sehingga belum mampu mendukung pemerataan akses pendidikan.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran secara bertahap. Belanja administrasi dapat dikurangi agar lebih efisien, kemudian dialihkan untuk pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kualitas guru, dan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Fokus pembiayaan sebaiknya tidak hanya pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada kualitas hasil pembelajaran siswa.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih sangat bergantung pada pemerintah daerah melalui APBD. Ketergantungan ini cukup berisiko

karena jika kondisi fiskal daerah menurun, program pendidikan juga akan terdampak. Oleh sebab itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan agar sistem pendidikan lebih stabil dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melibatkan sektor swasta melalui kerja sama pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP). Model ini dapat digunakan untuk pembangunan jaringan internet sekolah, penyediaan perangkat digital, serta pelatihan teknologi bagi guru. Perusahaan juga dapat berkontribusi melalui program CSR di bidang pendidikan.

Selain itu, pemerintah dapat membentuk dana abadi pendidikan yang digunakan untuk beasiswa dan peningkatan kompetensi guru. Skema lain seperti obligasi pendidikan daerah juga dapat dipertimbangkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan jangka panjang. Dengan adanya pembiayaan alternatif, beban APBD dapat berkurang dan program pendidikan dapat berjalan lebih maksimal.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Beberapa praktik negara OECD yang realistis diterapkan di Indonesia adalah sistem penganggaran berbasis kinerja, distribusi dana berdasarkan kebutuhan siswa, serta evaluasi pendidikan berbasis data. Sistem penganggaran berbasis kinerja dapat membantu pemerintah menilai apakah anggaran yang diberikan benar-benar menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, pembiayaan berbasis kebutuhan siswa juga penting untuk diterapkan agar sekolah di daerah terpencil atau sekolah dengan siswa kurang mampu memperoleh dukungan lebih besar dibanding sekolah yang sudah maju. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Namun, penerapan sistem tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas data pendidikan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur digital, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sistem berbasis data. Budaya birokrasi yang masih

berfokus pada administrasi juga menjadi hambatan dalam menerapkan sistem evaluasi yang lebih modern dan transparan.

4. Rancangan Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun

Dalam lima tahun ke depan, reformasi pendidikan di Nusantara Raya perlu difokuskan pada pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan efektivitas anggaran. Pada tahap awal, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran serta memperbaiki sistem distribusi guru agar lebih merata antara kota dan desa.

Struktur belanja juga perlu diubah secara bertahap dengan mengurangi pengeluaran administrasi dan meningkatkan anggaran untuk digitalisasi sekolah, bantuan siswa, dan pelatihan guru. Pemerintah dapat menargetkan peningkatan akses internet sekolah, penyediaan perangkat pembelajaran digital, serta pengembangan platform pembelajaran berbasis teknologi.

Dalam peningkatan kualitas guru, pemerintah perlu memberikan pelatihan rutin, insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, dan sistem penghargaan berbasis kinerja. Dengan demikian, kualitas pembelajaran dapat meningkat secara lebih merata. Untuk monitoring dan evaluasi, pemerintah perlu membangun sistem data pendidikan terpadu yang dapat memantau penggunaan anggaran, perkembangan hasil belajar siswa, dan kondisi sekolah secara berkala. Evaluasi tahunan juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di Nusantara Raya.